



RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN PENGARON TAHUN 2025

**JALAN PAHLAWAN NO.83 RT.01 DESA PENGARON KP : 70674
KABUPATEN BANJAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kemudahan dari Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan tugas pokok Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar. Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan yang memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2025 triwulan II dan penjelasan terkait terrealisasi atau tidaknya target program/kegiatan/sub kegiatan, faktor-faktor yang mempengaruhi beserta kebijakan yang akan diambil oleh Kecamatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini maka dilakukan juga penyesuaian target indikator pada sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak perubahan belanja dan mengacu pada realisasi kinerja dan belanja sampai dengan triwulan II tahun 2025.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) ini dapat kami susun, diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman bagi penyusunan dan pelaksanaan berbagai strategi, program dan kegiatan tahunan. Semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Pengaron dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Pengaron, 20 Juni 2025
Plt. Camat Pengaron,



H. Sukir, S.Sos, M.Pd
Pembina (IV/a)
NIP. 196706201986111001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II	6
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II	1
2.1.2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II	2
2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II	2
2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan	3
2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan	3
2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah	3
2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut	3
BAB III	12
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	12
3.1. Perubahan Indikator Kinerja	12
3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan	12
3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	12
3.4. Alasan dilakukan perubahan	12
BAB IV	21
PENUTUP	21
4.1. Catatan Penting	21
4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	21
4.3. Rencana Tindak Lanjut	22

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan
Capaian Renstra SKPD 1

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Tahun 2025 s.d Triwulan
I..... 5

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat
Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Permendagri ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan Rencana Kerja pemerintah (RKPD) Tahun 2025.

Rencana Perubahan Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD), adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan ditengah tahun berjalan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja daerah dan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
- Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berpedoman pada penjelasan di atas maka ada beberapa hal yang menjadi latar belakang perubahan rencana kerja Kecamatan Pengaron Tahun 2025 ini:

1. Hasil evaluasi Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target kinerja pada sasaran, program dan kegiatan sebagai dampak perubahan/penyesuaian belanja.
2. Surat Edaran Bupati Banjar Nomor: 000.7.2.4/285/PPE-Bapelitbang tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

- Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 11);
 22. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 56);
 23. Peraturan Bupati Banjar Nomor **XX** tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026;
 24. Peraturan Bupati Banjar Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 29);
 25. Peraturan Bupati Banjar Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 26)
 26. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Perubahan (Perubahan Renja) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menyesuaikan target kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dampak dari perubahan belanja dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun berjalan.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan perubahan rencana kerja Kecamatan Pengaron tahun 2025 adalah untuk menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron agar terjaga keselarasan dengan program tahunan daerah. Selain itu juga untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada kondisi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi

masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2025, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan perubahan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan I mengacu pada APBD tahun 2025. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai Uraian garis besar mengenai rekapitulasi perubahan program dan kegiatan, antara lain meliputi Perubahan Indikator Kinerja, Jumlah Program dan Kegiatan serta Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya dan alasan dilakukan perubahan

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kecamatan Pengaron Kabupaten banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagai unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Pada tahun anggaran 2025 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar melaksanakan 16 program, 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.581.600.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat perubahan Kecamatan Pengaron melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan total pagu dana sebesar Rp. 3.611.232.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan Kecamatan Pengaron hingga triwulan I secara lengkap, tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 hingga Triwulan I dan Capaian Renstra SKPD

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7					Urusan : Unsur Kewilayahan											
7	1				Bidang Urusan : Kecamatan											
7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Pengaron	73,50	78,16	76	87,62	115	88	0	0	87,62	115
7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	76	100	100	100	25	25	100	100	100
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	69	22	13	13	100	2	0	0	37	53,62
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	100
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	100
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokuen Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	100
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2	2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.01	6	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	22	21	21	100%	4	4	100%	47	11.75
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74	22	21	21	100%	6	6	100%	49	62,16
7	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	100%
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	16	13	94%	16	14	100%	41	92.85
7	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	48	12	12	100%	3	3	100%	63	25,00
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	4	1	1	100%	3	3	100%	8	80,00
7	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100%	100%
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4	24	1	1	100%	1	1	100%	26	65,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
						Barang Milik Daerah pada SKPD										
7	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	36	1	1	100%	1	0	0%	37	90,25
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	30	10	6	100%	0	0	0%	36	36,00
7	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8	4	4	100%	1	0	0%	12	12
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	12	5	5	100%	1	1	0%	17	34,00
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8	24	8	8	100%	2	2	100%	34	42,50
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	24	12	12	100%	0	0	0	36	90,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	36	2	2	100%	1	1	100%	39	32,50
7	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	20	11	11	100%	1	1	100%	32	66,67
7	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	48	12	12	100%	3	3	100%	63	52,50
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	12	2	2	100%	1	1	100%	15	70,50
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	13	39	13	13	100%	3	3	100%	55	23,07

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
						Umum Kantor yang Disediakan										
7	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	44	6	6	100%	2	2	100%	52	46,66
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15	48	15	15	100%	5	1	20%	64	26,66
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	12	3	3	100%	3	1	33%	16	50,33
7	1	2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	43.75
7	1	2	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	43.75	43.75

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48	12	13	13	100%	3	3	100%	21	43.75
7	1	2	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10	2	4	4	100%	4	0	0%	5	50
7	1	3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100	100	100
7	1	3	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	48	12	12	12	100%	12	12	100%	36	75,00
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	1	5	5	100%	1	0	0%	3	75,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	4	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	1	1	1	100%	0	0	0%	2	50,00
7	1	4	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi	100	100	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	4	2.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	1	1	1	100%	0	0	0%	2	33.33
7	1	5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100%	25	25	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terasilitasi	100	100	100	100	100%	25	25	100	100	100
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	800	200	200	200	100%	0	0	0%	600	75
7	1	5	2.01	7	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	8	3	2	2	100%	1	1	100%	5	62.5
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	48	12	12	12	100%	3	1	33%	18	37.5

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	100	80	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	80	100	100	100%	25	25	100%	100	100
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0	0	0	0	0%	0	0	0%	2	50
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	1	4	4	100%	0	0	0%	1	25
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	4	0	0	0	0	0	0	0%	1	25
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	4	1	0	0	0	0	0	0%	2	50
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4	1	0	0	0%	0	0	0%	1	25

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n) 2025 triwulan I	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11	12=(5+7+10)	13=(12/4)
7	1	6	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	1	1	1	100%	0	0	0%	1	25

2.1.1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Dalam pelaksanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2025, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun beberapa sub kegiatan belum mencapai target yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM
 - Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Intansi Vertikal
3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 - Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas desa.
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

ii. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

- a. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan I

Tidak terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai Triwulan I. Sebagai catatan

terkait dengan realisasi capaian kinerja Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan indikator Nilai Evaluasi Kecamatan sampai dengan Triwulan II ini belum ada, mengingat penilaian Evaluasi Kecamatan belum dilaksanakan.

Sebagai catatan terkait dengan realisasi capaian kinerja seluruh program dengan Indikator Rata-rata IKM Kecamatan dan seluruh kegiatan dengan Indikator Nilai IKM Kecamatan Pengaron sampai dengan Triwulan I ini belum ada hasilnya mengingat realisasi dari indikator tersebut baru akan dikeluarkan pada akhir tahun.

2.1.4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada triwulan I tahun 2025

- Beberapa kegiatan terhambat akibat banyak nya kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan dan menunggu jadwal dari pihak narasumber kegiatan atau jadwal yang ditentukan serta masih belum optimalnya penyusunan pelaksanaan kegiatan oleh penyelenggara.
- Pada Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yaitu menunggu jadwal BIMTEK yang akan dilaksanakan pada Triwulan III di awal Bulan JULI.
- Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal yaitu karena kegiatan MTQ dilaksanakan bulan September.
- Kurangnya SDM dan Sarana Penunjang Kegiatan
- Terkendala pada Aplikasi untuk Pengadaan Barang dan jasa

2.1.5. Faktor-faktor penyebab melebihi / tercapainya target kinerja program/ kegiatan

Faktor-faktor penyebab melebihi tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah :

- Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan
- Perencanaan kegiatan yang baik dan terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan.
- Komitmen dari pimpinan dan koordinasi internal dan eksternal yang baik dalam melaksanakan target program dan kegiatan.
- Tersedianya Anggaran
- Koordinasi yang baik antar Pihak yang terkait

2.1.6. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Jika melihat capaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan I, dimana hampir semua sub kegiatan telah mencapai target yang ditentukam, hal ini berimplikasi positif terhadap capaian program Renstra Kecamatan Pengaron

2.1.7. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Membuat perencanaan kegiatan dan penganggaran kas yang tepat
- b. Melakukan percepatan terhadap kegiatan yang belum mencapai target
- c. Adanya Koordinasi baik di Internal Kecamatan maupun dengan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Aktivitas di Kegiatan Sehingga Target Kinerja dapat diperoleh secara maksimal dan Optimal.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar 2025 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja Kecamatan Pengaron Tahun 2025 s.d Triwulan I

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
					3.246.750.600				
01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI)	73,00	Nilai	3.246.750.600	-	1.506.398.263	-	504.918.397
	Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi SKPD	100	persen	34.008.900	59%	20.380.000	41%	8.366.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	Dokumen	11.999.900	4	7.153.000	4	3.686.500
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	Dokumen	0	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	Dokumen	0	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	0	Dokumen	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0	Dokumen	0	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4	Laporan	8.995.000	1	6.720.000	1	3.916.500
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Laporan	13.014.000	6	6.507.000	6	763.000

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	1.981.660.000		593.626.588		342.374.256
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji,Tunjangan ASN	16	Orang/Bulan	1.913.500.000	14	575.682.088	14	328.764.256
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	53.160.000	3	13.290.000	3	13.290.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir	1	Laporan	15.000.000	0	300.000	0	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Persen	21.000.300				
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	12.000.300	3	100.000	3	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan	9.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	100	Persen	50.700.000				
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	5.700.000	0	480.000	0	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	45.000.000	-	-	-	-

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen	179.720.500				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	12.000.000	-	731.000	-	518.200
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5	Paket	348.000	1	3.000.000	1	2.924.400
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8	Paket	11.406.500	2	587.000	-	585.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0	Paket	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	87.133.000	-	32.000.000	-	9.079.100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	546.976.000				
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	6	Unit	23.424.000	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20	Unit	523.552.000	1	9.685.000	1	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	197.140.900				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	2.000.000	-	600.000	-	300.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2	Laporan	11.120.900	-	9.874.998	-	6.990.704
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	184.020.000	3	43.635.000	3	42.589.020

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100	Persen	235.544.000				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	95.920.000	2	10.400.000	0	3.067.922
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	15	Unit	49.640.000	5	1.200.000	0	330.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	89.984.000	1	-	0	-
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	100	Persen	35.702.000				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	persen	14.880.000				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4	laporan	14.880.000	1	-	0	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Koordinasi Kegiatan Kessos	100	Persen	20.822.000				

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	51.775.000				
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Kelurahan	100	Persen	51.775.000				
	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5	Kelembagaan Kemasyarakatan	10.490.000	5	9.250.000	5	9.237.400
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	4	Laporan	41.285.000	-	1.957.800	-	1.027.800
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	100	Persen	25.966.800				
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100	Persen	11.023.800				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang Dilaksanakan	1	Laporan	5.296.000	-	-	-	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	5.727.800	-	-	-	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terasilitasi	100	Persen	14.943.000				

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Dilaksanakan	1	Laporan	14.943.000	0	3.000.000	0	3.000.000
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Persen	191.405.600				
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	100	Persen	191.405.600				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200	Orang	81.833.000	-	-	-	-
	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5	Dokumen	109.572.600	0	54.147.300	0	-
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	Persen	30.000.000				

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025		ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I		REALISASI KINERJA & ANGGARAN TRIWULAN I	
			Volume	Satuan	DPA	TK	Rp	RK	Rp
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Persen	30.000.000				
	Fasilitasi Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelola Dataan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4	Dokumen	15.000.000	-	-	-	-
	Fasilitasi Penataan Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan ,Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	4	Dokumen	15.000.000	-	2.000.000	-	-

Sumber data : Laporan Realisasi Renja Kecamatan Pengaron Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Perubahan Indikator Kinerja

Pada Perubahan Renja Kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 ini, terdapat perubahan untuk target indikator kinerja pada program/kegiatan maupun sub kegiatan karena adanya Perubahan pada Rencana Strategis Kecamatan Pengaron Tahun 2025-2029 menyesuaikan dengan kondisi kinerja yang telah terlaksana sesuai dengan capaian kinerja periode sebelumnya di antaranya perubahan pada indikator kinerja sasaran Camat, Perubahan indikator program dan kegiatan. Selain perubahan indikator, juga terdapat perubahan target dari beberapa program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3.2. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Tidak ada perubahan jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan pada perubahan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Tahun 2025 ini.

Ada 6 Program 15 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Nama program, kegiatan dan sub kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada table 3.1 dibawah.

3.3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Total kebutuhan dana/pagu indikatif pada Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar setelah perubahan adalah Rp 3.611.232.000 (Tiga Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Semua sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Banjar.

3.4. Alasan dilakukan perubahan

Alasan dilakukan perubahan anggaran yaitu :

1. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, perubahan rincian belanja karena menambah anggaran untuk PPh21 pada gaji dan tunjangan ASN;
2. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan karena penambahan anggaran Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota;
3. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami penurunan anggaran karena pengurangan upah tenaga kontrak yang telah lulus sebagai PPPK;

4. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami penambahan anggaran untuk Bahan Bakar Minyak mobil operasional Camat dan anggaran pemeliharaan untuk mobil operasional Sekretaris Kecamatan;
5. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan mengalami penambahan anggaran untuk jasa sewa tenda/stand UMKM dan anggaran untuk kegiatan monitoring evaluasi APBDes;

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai	88,00 Nilai	3.581.600.000	3.611.232.000	255.631.140	Penambahan Anggaran
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai SAKIP (Predikat SAKIP)	70 Nilai	70 (BB)	3.246.750.600	3.259.382.600	90.966.000	Penambahan Anggaran
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	Indeks Kepatuhan dan Kinerja Intern (IKKI) Kecamatan Martapura	73,50 Nilai	73,50 Nilai	3.246.750.600	3.259.382.600	90.966.000	Penambahan Anggaran
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Perangkat daerah sesuai ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	34.008.900	34.008.900	0	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	13 Dokumen	11.999.900	11.999.900	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	8.995.000	8.995.000	0	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	21 Laporan	13.014.000	13.014.000	0	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	100 Persentase	100 Persentase	1.981.660.000	1.981.660.000	0	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/ Bulan	16 Orang/ Bulan	1.913.500.000	1.913.500.000	0	-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	53.160.000	53.160.000	0	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	15.000.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Tersusun	Persentase Laporan Pengelolaan dan Pengamanan Aset Barang Milik Daerah	100 Persentase	100 Persentase	21.000.300	21.000.300	0	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	12.000.300	7.000.300	(5.000.300)	Karena Efisiensi Anggaran
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	9.000.000	9.000.000	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan dan tepat Waktu	100 Persentase	100 Persentase	50.700.000	50.700.000	0	-
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	5.700.000	5.700.000	0	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	45.000.000	36.000.000	(9.000.000)	Karena Efisiensi Anggaran
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persentase	100 Persentase	179.720.500	179.720.500	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.000.000	12.000.000	0	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	348.000	348.000	0	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	11.406.500	11.406.500	0	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	0	0	0	0	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	155.966.000	172.598.000	44.500.000	Sesuai SE No. 000.7.2.4/471/PP E-Bappedalitbang Tanggal 24 Mei 2025

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Rencana Kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	546.976.000	546.976.000	0	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	23.424.000	23.424.000	0	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	20 Unit	523.552.000	523.552.000	0	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persentase	100 Persentase	197.140.900	197.140.900	0	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.000.000	2.000.000	0	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	11.120.900	11.120.900	0	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	184.020.000	184.020.000	0	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 Persentase	100 Persentase	235.544.000	235.544.000	0	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	95.920.000	105.920.000	10.000.000	Penambahan Anggaran untuk Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit	49.640.000	49.640.000	0	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	89.984.000	89.984.000	0	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana	Persentase Pelayanan Publik Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan	100 Persentase	100 Persentase	35.702.000	35.702.000	0	-
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit	100 Persentase	100 Persentase	14.880.000	14.880.000	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Kerja Perangkat Daerah yang	Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 Laporan	13 Laporan	14.880.000	14.880.000	0	-
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Pelayanan yang Mudah di akses Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelayanan yang Mudah di akses Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	20.822.000	20.822.000	0	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	51.775.000	68.775.000	17.000.000	Penambahan Anggaran
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persentase	100 Persentase	51.775.000	68.775.000	17.000.000	Penambahan Anggaran
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	10.490.000	10.490.000	0	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	41.285.000	58.285.000	17.000.000	Penambahan Anggaran dari subkegiatan lain dan penambahan

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
									sesuai telaahan forum camat
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditindaklanjuti	100 Persentase	100 Persentase	25.966.800	25.966.800	0	-
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 Persentase	100 Persentase	11.023.800	11.023.800	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	5.296.000	5.296.000	0	-
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	5.727.800	5.727.800	0	-
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah yang Terfasilitasi	100 Persentase	100 Persentase	14.943.000	14.943.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan		100 Persentase				

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	14.943.000	14.943.000	0	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan umum yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	191.405.600	191.405.600		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persentase	100 Persentase	191.405.600	191.405.600		
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Nega-ra Kesatuan Repu-blik Indonesia-	200 Orang	200 Orang	81.833.000	81.833.000		
	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Dokumen	5 Dokumen	109.572.600	109.572.600	0	-

No.	Tujuan/ Sasaran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Sebelum Perubahan	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Setelah Perubahan	Target		Pagu			Alasan Perubahan/ Keterangan
				Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Renja 2025	Perubahan Renja 2025	Jumlah Perubahan (+/-)	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0	0	0	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Desa/Kelurahan	Persentase desa yang memiliki tata kelola administrasi desa yang baik	100 Persentase	100 Persentase	30.000.000	30.000.000	0	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persentase	100 Persentase	30.000.000	30.000.000	0	-
			Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti		100 Persentase				
			Jumlah Pelayanan yang Mudah Diakses		100 Persentase				
			Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan		100 Persentase				
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pelayanan yang mudah di akses, Persentase Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000	15.000.000	0	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	15.000.000	0	-

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Pengaron Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi dalam tahun berjalan, serta sebagai respon terhadap hasil evaluasi, perubahan kebijakan, dan kebutuhan prioritas pembangunan daerah dan diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tupoksi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar serta memberikan gambaran bagi pemerintahan daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja SKPD dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar juga mengemban tugas penting dalam Visi dan Misi Kabupaten Banjar yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis Berlandaskan Gotong Royong dan Keadilan”***.

Perubahan Renja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar di masa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik ditahun berikutnya.

Perubahan Renja sebagai pedoman bagi Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung terlaksananya semua program, kegiatan dan sub kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pengaron Tahun 2025, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kecamatan Pengaron secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab;

2. Melaksanakan perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
3. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2025, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengaron, 20 Juni 2025

Plt. Camat Pengaron



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H. Sukir", written over a horizontal line.

H.Sukir, S.Sos, M.Pd

Pembina (IV/a)

NIP.196706201986111001

LAMPIRAN

SK pembentukan tim

Tabel rekapitulasi rumusan rencana perubahan program dan kegiatan
(cetak SIPD RI)



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN PENGARON

Alamat : jalan pahlawan no.83 rt.01 desa pengaron kp : 70674
Kabupaten banjar

KEPUTUSAN PLt. CAMAT PENGARON

KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 029 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBETUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2025

CAMAT PENGARON

- Menimbang : a. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pengaron Tahun 2025, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini dan demi lebih efektif dan terarahnya pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan PLt. Camat Pengaron Kabupaten Banjar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56799);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021);

13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 30 Mei 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. CAMAT PENGARON TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 KECAMATAN PENGARON KABUPATEN BANJAR.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Pemerintah Kecamatan PengaronKabupaten Banjar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Kecamatan PengaronKabupaten Banjar Tahun 2025 dimaksud dalam Diktum kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan PengaronKabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pengaron
pada tanggal : 01 Juni 2025

PLt.CAMAT PENGARON,



H. Sukir, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 196706201986111001

Lampiran I : Keputusan PLt.Camat
Pengaron
Nomor : 029 Tahun 2025
Tanggal : 01 Juni 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN PENGARONKABUPATEN BANJAR**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	PLt.CAMAT
2.	SEKRETARIS	SEKRETARIS KECAMATAN
3.	ANGGOTA	Kasi Pemerintahan
		Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		Kasi Kesejahteraan Sosial
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset

PLt.CAMAT PENGARON,



H. Sukir, S.Sos, M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 196706201986111001

Lampiran II : Keputusan PLt.Camat Pengaron
Nomor : 029 Tahun 2025
Tanggal : 01 Juni 2025

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025 KECAMATAN PENGARON
KABUPATEN BANJAR**

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Ketua	a. Bertanggungjawab terhadap aktifitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pengaron Tahun 2025; b. Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025; c. Menyampaikan laporan hasil pekerjaan Tim Penyusun kepada Bappedalitbang Kabupaten Banjar sebagai mitra kerja.
2	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pengaron Tahun 2025; b. Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pengaron Tahun 2025; c. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada penanggungjawab penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pengaron Tahun 2025.
3	Anggota	a. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pengaron Tahun 2025 tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Pengaron; b. Melakukan analisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pengaron Tahun 2025; c. Melakukan telaah terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pengaron; d. Melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2025; e. Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Pengaron Tahun 2025; f. Merumuskan kegiatan prioritas Rencana Kerja

		(RENJA) Perubahan Kecamatan Pengaron Tahun 2025; g. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Kerja Perubahan pada bidangnya masing- masing; h. Melaksanakan penyempurnaan Rencana Kerja Perubahan atas hasil telaahan, koreksi dan masukkan bidangnya masing-masing; i. Menyesuaikan dokumen rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan Dokumen RKPD Tahun 2025.
--	--	--

PLt.CAMAT PENGARON,



H. Sukir, S,Sos, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 196706201986111001

LINK Tabel rekapitulasi rumusan rencana perubahan program dan kegiatan
(cetak SIPD RI)

https://drive.google.com/drive/folders/1QFW_wMWgHFq5JR1nWSbs7rh_9PaTVI4v?usp=drive_link